

**ASPEK HUKUM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN  
DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI  
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
10/5/BI/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN  
DALAM NEGERI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana  
dalam ilmu hukum**



**Oleh :**

**Nama : IRWANSYAH**

**NPM : 1307350101**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2017**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**Nama : IRWANSYAH**

**NPM : 1307350101**

**Judul :**

**ASPEK HUKUM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN  
DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI  
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
10/5/BI/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN  
DALAM NEGERI**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan/dipertahankan

Jakarta, 21 Februari 2018

Pembimbing,

**H. ANSHORI, S.H. M.H. M.Pd.I.**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul :

**ASPEK HUKUM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN  
DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI  
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
10/5/BI/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN  
DALAM NEGERI**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan  
tanggungjawab moral penulis

Jakarta, 21 februari, 2018

**6000,-**

**IRWANSYAH**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/5/BI/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

Nama/NPM : Irwansyah /1307350101

Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri, sektor pertanian dan beberapa sektor lainnya di Indonesia akan semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan. Untuk mendukung lancarnya transaksi perdagangan dalam negeri, maka pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/BI/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, yang menetapkan berlakunya L/C atau *Letter of Credit* sebagai salah satu cara pembayaran bagi kegiatan transaksi perdagangan khusus di dalam negeri yang kemudian dinamakan dengan istilah SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Dalam skripsi ini penulis membahas salah satu cara pembayaran transaksi perdagangan menggunakan SKBDN, mulai dari definisi, mekanisme, dan kaitannya dengan peranan dan kewajiban suatu bank dalam SKBDN. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana praktik pembayaran transaksi perdagangan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)? dan (2) Bagaimana tanggungjawab hukum Bank terhadap penyimpangan pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier guna memecahkan dan menjawab permasalahan pada objek penelitian. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa SKBDN atau sering disebut LC local adalah instrumen yang diterbitkan oleh Bank (*Issuing Bank*), atas permintaan *Applicant* yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *Beneficiary* apabila *Issuing Bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN, dengan Tujuan SKBDN untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri, sangat penting dan dibutuhkan oleh pelaku usaha. Khususnya untuk transaksi barang yang terkait langsung dengan kegiatan perdagangan dalam negeri. Fasilitas yang diberikan berupa penangguhan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan transaksi perdagangan di dalam negeri yang menggunakan SKBDN.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Pembayaran Transaksi Perdagangan Dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/Bi/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/Pbi/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Edy Susanto, SH, MH, MA. selaku Ketua Yayasan LPIHM IBLAM yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Adi Sujatno, SH, MH. selaku Ketua STIH IBLAM yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
3. Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, SH, MH. selaku Ketua Program Studi S1 yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
4. Bapak H. Anshori, SH, MH, M.Pd.I selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Herril Fahmi, SH, MH selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan mengarahkan dalam sidang skripsi ini.
6. Ibu Rr. Lyia Aina Prihadiyati, SH, MH selaku dosen penguji yang memberikan waktu untuk menguji dan mengarahkan dalam sidang skripsi ini.
7. Seluruh Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Ibunda yang saya cintai dan hormati H. Hanifah binti Abdullah yang doanya selalu menyertai selama hidup saya.

9. Istri yang saya cintai dr. Deliana Permatasari, MM. yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Anak-anak yang saya cintai Alya Safira Azhar dan Afa Hana Nabila yang menjadi inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Kakak dan adik-adik yang saya cintai yang doanya selalu menyertai.
12. Sahabat saya Raviyanto, SS. yang membantu sebagai editor dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat di STIH IBLAM angkatan A21 yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Seperti pepatah Melayu mengatakan “tiada gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Terima Kasih.

Jakarta, 21 Februari 2018

Irwansyah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Landasan Teori.....	5
E. Metode Penelitian .....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembayaran dan Lalu Lintas Pembayaran..	15
B. Definisi, Tujuan, dan Manfaat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).....	17
C. Landasan Yuridis Penggunaan SKBDN Dalam Praktik Transaksi Perdagangan.....	22
D. Syarat-syarat dan Ketentuan Penerbitan/Pembukaan	

	SKBDN.....	29
E.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.....	31
BAB III	ASPEK HUKUM PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN DENGAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI	
A.	SKBDN Sebagai Lalu Lintas Pembayaran Modern.....	34
B.	Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan dan Mekanisme SKBDN.....	37
C.	Peranan dan Kewajiban Bank Dalam Menangani SKBDN.....	43
BAB IV	TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP PENYIMPANGAN PENCAIRAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI	
A.	Mekanisme Perdagangan Menggunakan SKBDN.....	48
B.	Mekanisme Alur SKBDN Secara Umum.....	54
C.	Alur SKBDN di Bank .....	58
D.	Contoh Kasus Penyimpangan Pencairan SKBDN di Bank Mandiri dan di Bank Syariah Mandiri.....	61
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	66



B. Saran.....	67
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	70
---------------------	----

Lampiran 1 : PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/5/PBI/2008  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT  
KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

Lampiran 2 : PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/6/PBI/2003  
TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM  
NEGERI GUBERNUR BANK INDONESIA

Lampiran 3 : CONTOH DOKUMEN SKBDN

BIODATA PENULIS